PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DI PERKOTAAN INDONESIA

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

ANGGI

NIM. B1011211023

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Anggi
NIM	:	B1011211023
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran Di Perkotaan Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Proposal / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Proposal / Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 26 Agustus 2025

Anggi
NIM.B1011211023

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anggi
NIM	: B1011211023
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Tanggal Ujian	: 29 Juli 2025
Judul Tugas Akhir (TA)	: Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran Di Perkotaan Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 26 Agustus 2025

Anggi

NIM. B1011211023

LEMBAR YURIDIS

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu WaTaala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul "**Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran Di Perkotaan Indonesia**" dengan baik dan semaksimal mungkin. Tidak lupa Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasullullah Muhammad Shallahu'alaihi Wa Salam beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya, Aamiin. Tugas akhir ini ditulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar S1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.

Tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu penulis selama proses penulisan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Fariastuti S.E., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing, membantu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan selesai.
5. Bapak Eko Supriyanto, S.E.,M.E. selaku dosen penguji pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Supriaman, S.Pd.,M.Si. selaku dosen penguji kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses administrasi demi kelancaran tugas akhir ini.
9. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayah tercinta, Kadirman, dan Ibu tersayang, Narti. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala pengorbanan dan kerja keras yang telah Ayah dan Ibu berikan demi kehidupan dan masa depan penulis. Doa, cinta, dan semangat dari Ayah dan Ibu senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa hormat, cinta, dan bakti penulis kepada Ayah dan Ibu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan dalam setiap langkah Ayah dan Ibu.

10. Kakak tercinta, Tiara Kartika, A.Md. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa, serta semangat yang selalu diberikan. Kehadiran kakak menjadi sumber motivasi dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan studi ini hingga akhir.
11. Keponakan tersayang, Jiandra Febtiandi. Terima kasih sudah hadir di dunia, dengan kepolosan dan keceriaan jian mampu menghadirkan kebahagiaan dan motivasi tersendiri dalam perjalanan studi ini.
12. Untuk sahabat penulis, Fitri Febryanti, Fira Fiani, Sintia, Meta Damayanti, Uthi Yuliandani. Terima kasih telah menemani penulis. Terima kasih telah menjadi teman yang mengisi hari-hari penulis hingga saat ini.
13. Untuk sahabat seperjuangan Dwifa Wandini, Lina Febrianti, Lolita, Yenia Kania, Maria Rafana Triyanti, Dela Anggita Yusticia yang selalu ada dan siap membantu penulis dalam melewati proses semester akhir, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Kita sudah melalui banyak hal lelah, tawa, bahkan hampir menyerah namun semua itu terasa lebih ringan karena kita menjalaninya sama sama. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari kesuksesan kita berikutnya.
14. Sahabat penulis, ketiga perempuan yang ada di dalam " SLAY GIRLS", Syarifah Aulia Amri, Bela Wulandari, Sindi Mercy. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, dan mencurahkan ketakutan yang pernah dihadapi.
15. Seluruh teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021, khususnya teman-teman kelas A. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang terjalin selama masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di jalannya masing-masing.
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Anggi. Terima kasih telah bertahan di tengah segala keterbatasan, tetap berdiri meski berkali-kali hampir menyerah, dan terus percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa pada hasil yang besar. Terima kasih karena tidak berhenti berjuang meski diiringi rasa takut, ragu, dan lelah yang tak terhitung. Pada akhirnya, keberanian untuk bangkit dan tekad untuk terus melangkah telah membawa penulis sampai pada titik ini, menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir dengan segala kisah perjuangannya.

Pontianak, 26 Agustus 2025

Anggi
NIM. B1011211023

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DI PERKOTAAN INDONESIA

ABSTRACT

Unemployment in urban areas of Indonesia remains a crucial issue in economic development. One of the factors influencing the dynamics of unemployment is the level of education and government expenditure. This study aims to examine the effect of education level and government expenditure on unemployment in urban areas of Indonesia. The type of research used is descriptive and causal, employing a panel data regression approach. The data used are panel data from 32 provinces in Indonesia for the period 2014 to 2023. The analysis method applied is Multiple Linear Regression. The results show that education level has a negative and significant effect on unemployment, indicating that higher levels of education tend to reduce unemployment. Meanwhile, government expenditure has a positive but not significant effect on unemployment, suggesting that an increase in government expenditure does not have a statistically significant impact on reducing unemployment in urban areas.

***Keywords**: Education Level, Government Expenditure, Unemployment.*

ABSTRAK

Pengangguran di wilayah perkotaan Indonesia masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi. Salah satu faktor yang berperan dalam dinamika pengangguran adalah tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di perkotaan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kausalitas dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia selama periode 2014 hingga 2023. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Sementara itu, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengangguran, artinya jika pengeluaran pemerintah meningkat maka pengangguran juga meningkat.

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN PERKOTAAN INDONESIA

Oleh: Anggi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Pendahuluan

Masalah pengangguran masih menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, adanya pengangguran menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Pengangguran, terutama di perkotaan tetap menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), pengangguran merujuk pada individu yang belum memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau berupaya memulai usaha baru. Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja *(skill mismatch)*. Secara umum, tingkat pengangguran lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan (BPS, 2023). Kondisi ini disebabkan oleh proses urbanisasi yang tidak selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas penciptaan lapangan kerja di kota-kota besar (Todaro & Smith, 2012).

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan kerja, tetapi juga dibekali kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat di dunia kerja. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk memahami berbagai peluang serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia guna mendukung keberhasilannya dalam bekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang, semakin besar pula kesempatan kerja yang dapat diraihnya (Becker, 1993). Namun demikian, peningkatan pendidikan tidak selalu menjamin penyerapan tenaga kerja, terutama apabila keterampilan lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. TPT justru lebih tinggi pada kelompok lulusan SMA dan perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran jika tidak diimbangi dengan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2021)**,** diperlukan kebijakan yang berfokus pada penguatan pendidikan serta pelatihan berbasis keterampilan guna meningkatkan kapasitas tenaga kerja dalam menghadapi persaingan di pasar kerja perkotaan. Pendidikan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja akan membantu menekan tingkat pengangguran yang disebabkan oleh *skill mismatch.*

Pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk belanja administrasi maupun pembangunan, dapat menciptakan permintaan tenaga kerja dan secara langsung berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Ketika belanja diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, dampaknya tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga meningkatkan keterhubungan ekonomi, membuka peluang usaha baru, serta mempercepat pertumbuhan sektor industri dan jasa. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, terutama melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, berperan penting dalam menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang (Afryani dkk., 2023). Namun demikian, pengeluaran pemerintah tidak selalu langsung berdampak pada penurunan pengangguran, melainkan bergantung pada dukungan dari pertumbuhan ekonomi dan investasi produktif (Kuswiyati & Utomo, 2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan keuangan negara, seperti pengeluaran untuk kepentingan umum, secara menyeluruh dan saling terhubung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran, khususnya di wilayah perkotaan yang sebagian besar didominasi oleh sektor informal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2. Permasalahan

Tingkat pengangguran di perkotaan Indonesia menunjukkan fluktuasi dalam satu dekade terakhir, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 6,40%. Meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi, tidak membuat tingkat pengangguran di perkotaan mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, yang dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, pemerintah telah meningkatkan pengeluarannya terutama setelah 2020, dengan harapan dapat mendorong perkembangan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan. Data menunjukkan bahwa setelah lonjakan pengeluaran pemerintah pada 2021, tingkat pengangguran di perkotaan mulai menurun tetapi terdapat juga periode di mana pengeluaran pemerintah meningkat tajam tetapi pengangguran tetap meningkat, seperti yang terjadi pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, pengeluaran pemerintah naik dari 396,0 triliun (2019) menjadi 406,5 triliun, tetapi tingkat pengangguran justru melonjak drastis dari 6,29% menjadi 8,98%. Maka terdapat kemungkinan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah masih belum digunakan secara optimal.

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kointegrasi antara tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran di perkotaan Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di perkotaan Indonesia

4. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kausalitas yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 34 provinsi selama periode 2014–2023, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan variabel yang diteliti yaitu tingkat pengangguran perkotaan, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah daerah. Definisi operasional masing-masing variabel mengacu pada standar BPS. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, yang mempertimbangkan antara Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect Model. Selain itu, dilakukan pula uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di perkotaan Indonesia selama periode 2014–2023, yang berarti semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat pengangguran, sejalan dengan teori Human Capital dan didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Pendidikan memberikan bekal keterampilan, pengetahuan, dan pola pikir yang meningkatkan daya saing di pasar kerja. Namun, terdapat juga penelitian yang menemukan pengaruh tidak signifikan atau bahkan positif, yang bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri. Sementara itu, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran, bertentangan dengan teori Keynes dan hipotesis awal, kemungkinan karena alokasi anggaran yang kurang efektif atau tidak diarahkan pada sektor pencipta kerja. Beberapa studi mendukung hasil ini, meskipun ada juga yang menemukan pengaruh signifikan—baik positif maupun negatif—tergantung pada efektivitas penggunaan anggaran. Nilai R^2 sebesar 0,6462 menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pengeluaran pemerintah mampu menjelaskan 64,62% variasi pengangguran, dan uji F menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel tersebut signifikan memengaruhi pengangguran. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengeluaran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di perkotaan Indonesia selama tahun 2014–2023, diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan peluang kerja dan produktivitas masyarakat. Sementara itu, pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran. Meskipun anggaran pemerintah mengalami peningkatan, hal tersebut belum cukup efektif dalam menurunkan angka pengangguran. Hal ini dapat disebabkan oleh alokasi anggaran yang belum tepat sasaran atau kurang mendukung penciptaan lapangan kerja secara langsung.

Berdasarkan hasil tersebut, saran bagi pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah diarahkan secara lebih produktif, terutama pada sektorsektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi seperti infrastruktur, pendidikan vokasi, pelatihan kerja berbasis industri, serta pemberdayaan UMKM. Evaluasi efektivitas program pemerintah sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam melihat apakah belanja negara benar-benar menjangkau kelompok rentan di wilayah perkotaan dengan tingkat pengangguran tinggi. Pengawasan dan transparansi dalam implementasi program juga harus diperkuat agar anggaran yang besar tidak siasia. Peningkatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan penyesuaian kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan berbasis teknologi dan industri kreatif perlu diperluas agar lulusan siap bersaing dan terserap di dunia kerja.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT…….……..i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR…….……ii
UCAPAN TERIMA KASIH…….iv
ABSTRAK……..vi
RINGKASAN……...……vii
DAFTAR ISI…….…….xi
DAFTAR TABEL……...……..xii
DAFTAR GAMBAR……...….xiii

1. PENDAHULUAN……..2
2. KAJIAN LITERATUR…….5
2.1 Tinjauan Teori……5
2.2 Kajian Empiris……6
2.3 Kerangka Konseptual…….7
2.4 Hipotesis Penelitian……7
3. METODE PENELITIAN……..8
4. HASIL DAN PEMBAHASAN……..9
4.1 Gambaran Konteksual……...……9
4.2 Hasil Penelitian……...……..12
4.3 Pembahasan……...…13
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI…….……15

DAFTAR RUJUKAN……...….17
LAMPIRAN……..…….20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pengangguran, Pendidikan Terakhir Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia, 2014-2023……..3
Tabel 2. Tingkat Pengangguran, Pendidikan Tinggi, dan Pengeluaran Pemerintah di Perkotaan menurut Provinsi, 2022……10

DAFTAR TABEL

Gambar 1. Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja……...…….6
Gambar 2. Kerangka Konseptual……..7

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANGGURAN DI PERKOTAAN INDONESIA

Anggi[1]

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Unemployment in urban areas of Indonesia remains a crucial issue in economic development. One of the factors influencing the dynamics of unemployment is the level of education and government expenditure. This study aims to examine the effect of education level and government expenditure on unemployment in urban areas of Indonesia. The type of research used is descriptive and causal, employing a panel data regression approach. The data used are panel data from 32 provinces in Indonesia for the period 2014 to 2023. The analysis method applied is Multiple Linear Regression. The results show that education level has a negative and significant effect on unemployment, indicating that higher levels of education tend to reduce unemployment. Meanwhile, government expenditure has a positive but not significant effect on unemployment, suggesting that an increase in government expenditure does not have a statistically significant impact on reducing unemployment in urban areas.

Keywords*: Education Level, Government Expenditure, Unemployment.*

ABSTRAK

Pengangguran di wilayah perkotaan Indonesia masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi. Salah satu faktor yang berperan dalam dinamika pengangguran adalah tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di perkotaan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kausalitas dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia selama periode 2014 hingga 2023. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Sementara itu, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengangguran, artinya jika pengeluaran pemerintah meningkat maka pengangguran juga meningkat.

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran.

[1] b1011211023@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Masalah pengangguran masih menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, adanya pengangguran menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Pengangguran, terutama di perkotaan tetap menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), pengangguran merujuk pada individu yang belum memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau berupaya memulai usaha baru. Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja *(skill mismatch)*. Secara umum, tingkat pengangguran lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan (BPS, 2023). Kondisi ini disebabkan oleh proses urbanisasi yang tidak selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas penciptaan lapangan kerja di kota-kota besar (Todaro & Smith, 2012).

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan kerja, tetapi juga dibekali kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat di dunia kerja. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk memahami berbagai peluang serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia guna mendukung keberhasilannya dalam bekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang, semakin besar pula kesempatan kerja yang dapat diraihnya (Becker, 1993). Namun demikian, peningkatan pendidikan tidak selalu menjamin penyerapan tenaga kerja, terutama apabila keterampilan lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. TPT justru lebih tinggi pada kelompok lulusan SMA dan perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran jika tidak diimbangi dengan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2021)**,** diperlukan kebijakan yang berfokus pada penguatan pendidikan serta pelatihan berbasis keterampilan guna meningkatkan kapasitas tenaga kerja dalam menghadapi persaingan di pasar kerja perkotaan. Pendidikan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja akan membantu menekan tingkat pengangguran yang disebabkan oleh *skill mismatch.*

Pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk belanja administrasi maupun pembangunan, dapat menciptakan permintaan tenaga kerja dan secara langsung berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Ketika belanja diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, dampaknya tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga meningkatkan keterhubungan ekonomi, membuka peluang usaha baru, serta mempercepat pertumbuhan sektor industri dan jasa. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, terutama melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, berperan penting dalam menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang (Afryani dkk., 2023). Namun demikian, pengeluaran pemerintah tidak selalu langsung berdampak pada penurunan pengangguran, melainkan

bergantung pada dukungan dari pertumbuhan ekonomi dan investasi produktif (Kuswiyati & Utomo, 2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan keuangan negara, seperti pengeluaran untuk kepentingan umum, secara menyeluruh dan saling terhubung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran, khususnya di wilayah perkotaan yang sebagian besar didominasi oleh sektor informal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, penting juga memastikan bahwa pelaksanaan program di lapangan berjalan dengan tepat dan tidak sekedar formalitas, agar pengeluaran yang sudah direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan lebih banyak peluang kerja yang dibutuhkan. Penurunan tingkat pengangguran seharusnya bukan hanya target angka dalam dokumen kebijakan, tetapi juga harus terlihat nyata di lapangan, seperti lewat peningkatan kesempatan kerja yang bisa diakses oleh masyarakat, terutama di perkotaan. Agar program-program pengurangan pengangguran benar-benar efektif, pemerintah perlu melihat langsung ke lapangan apakah program pelatihan kerja atau bantuan usaha benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi. Tanpa pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan, anggaran yang besar sekalipun bisa menjadi tidak maksimal. Beberapa program pemerintah sudah dirancang untuk mengatasi pengangguran, tetapi seringkali pelaksanaannya tidak maksimal. Oleh karena itu, selain perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di tingkat daerah juga harus diperkuat (Wibisono, 2020).

Tabel 1. **Tingkat Pengangguran, Pendidikan Terakhir Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia, 2014–2023**

Tahun	Tingkat Pengangguran Perkotaan (%)	Tingkat Pengangguran Pedesaan (%)	Penduduk 15+ Lulusan (%)				Realisasi Pengeluaran Pemerintah (Triliun)
			SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
2014	7,12	4,81	34,12	20,41	12,53	2,37	261,7
2015	7,31	4,93	34,50	21,28	12,02	2,59	277,5
2016	6,60	4,51	39,40	16,42	14,59	3,01	297,8
2017	6,79	4,01	34,90	22,09	13,50	2,86	349,6
2018	6,45	3,97	32,48	21,60	13,82	3,35	370,9
2019	6,29	3,92	31,77	22,73	14,42	3,61	396,0
2020	8,98	4,71	30,97	22,26	17,29	4,13	406,5
2021	8,32	4,27	31,91	22,88	17,33	4,20	798,6
2022	7,74	3,43	31,42	23,40	19,08	4,56	846,8
2023	6,40	3,88	31,13	23,39	22,14	5,84	918,4

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015, 2018, 2021, 2023)

Berdasarkan Tabel 1, tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan tren fluktuatif selama 2014-2023. Setelah sempat meningkat hingga hampir 9% pada 2020 akibat pandemi COVID-19, tingkat pengangguran menurun dan mencapai 6,40% pada 2023. Di perdesaan, tren penurunannya lebih stabil dan konsisten. Di perdesaan, tren penurunannya lebih stabil dan konsisten. Dari sisi pendidikan, proporsi lulusan SD menurun 4,12% pada tahun 2014 menjadi 31,13% pada tahun 2023, sementara lulusan SMA meningkat dari 12,53% pada tahun 2014 menjadi 22,14% pada tahun 2023, kenaikan juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi, dari 2,37% pada tahun 2014 menjadi 5,84% pada tahun 2023. Namun, peningkatan jumlah lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi ternyata beriringan dengan tingginya tingkat pengangguran, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Dari sisi pengeluaran pemerintah, terjadi lonjakan signifikan dari sekitar Rp261 triliun pada 2014 menjadi lebih dari Rp918 triliun pada 2023. Meski demikian, efeknya terhadap penurunan tingkat pengangguran tidak secara langsung dan merata. Pada masa pandemi 2020–2021, pengeluaran pemerintah meningkat tajam, tetapi tingkat pengangguran justru meningkat. Ini menegaskan bahwa efektivitas pengeluaran bergantung pada arah kebijakan dan prioritas sektor yang didanai. Di wilayah urbanisasi tinggi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, tingkat pengangguran tetap tinggi, menunjukkan bahwa pendekatan pengurangan tingkat pengangguran perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan sektor dominan di masing-masing wilayah. Selain pendidikan, pengeluaran pemerintah juga berperan penting dalam menekan tingkat pengangguran. Tetapi, efektivitasnya bergantung pada bagaimana anggaran itu digunakan. Jika anggaran tersebut difokuskan ke pelatihan kerja dan dukungan untuk UMKM, maka penciptaan lapangan kerja akan lebih terasa (Bappenas, 2021). Agar kebijakan pengurangan tingkat pengangguran bisa benar-benar terasa, pemerintah perlu mendorong daerah untuk mengarahkan anggaran seperti pelatihan kerja berbasis kebutuhan lokal. Misalnya, di Jawa Barat atau Sumatera Barat yang tingkat penganggurannya tinggi.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan tren penurunan, angkanya masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang seimbang dengan jumlah serta kualitas tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, kebijakan pemerintah juga memegang peranan penting dalam memengaruhi perubahan tingkat pengangguran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: (1) Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengangguran di perkotaan Indonesia? (2) Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di perkotaan Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah, terhadap tingkat pengangguran di wilayah perkotaan Indonesia.